

SKRIPSI

KK
Int 03 / 03
Tri
t.

VIVID YUNI TRININGSIH

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA
OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS : PEMULANGAN TKI ILEGAL DARI MALAYSIA)**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2003**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA
OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS : PEMULANGAN TKI ILEGAL DARI MALAYSIA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi
Tugas-Tugas Guna Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

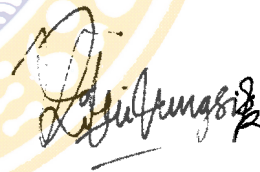
**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Dosen Pembimbing



Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP. 131653449

Penyusun



Vivid Yuni Triningsih
NIM. 039914961

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji

Pada hari : Selasa, 21 Januari 2003

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : J. Hendi Tedjonagoro, S.H.


Anggota :

1. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

2. Lina Hastuti, S.H., M.H.

3. Enny Harwati, S.H., M.H.

4. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the committee members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink and are placed to the right of each name. The first signature is for J. Hendi Tedjonagoro, followed by four signatures for the members: Dina Sunyowati, Lina Hastuti, Enny Harwati, and Sinar Ayu Wulandari.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara Indonesia (oleh Perwakilan Republik Indonesia) di Luar Negeri (Studi kasus : Pemulangan TKI Ilegal dari Malaysia), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tanggung jawab negara terhadap warga negaranya menurut Hukum Internasional adalah bahwa setiap negara akan membela dan melindungi warga negaranya, baik mereka itu di dalam wilayah negaranya ataupun berada di luar wilayah kedaulatannya. Kepastian suatu kewarganegaraan menentukan negara yang harus memberikan perlindungan kepada warga negaranya, termasuk melakukan penuntutan agar hak – hak asasi manusia warga negaranya dihormati.
2. Peranan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di negara maupun organisasi yang diwakilinya. Perwakilan Republik Indonesia sebagai wakil bangsanya merupakan “rumah” bagi seluruh Warga Negara Indonesia di luar negeri yang bertanggung jawab dalam perlindungan diplomatik warga negaranya. Kurang optimalnya pelaksanaan peranan perwakilan akan berpengaruh dalam pengambilan kebijaksanaan pemerintah.

IV.2 Saran

Tanggung jawab negara Indonesia terhadap warga negaranya dalam penanganan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia harus dilakukan dengan dua cara, yaitu ke dalam melakukan penertiban pengiriman TKI, sedangkan keluar adalah melakukan diplomasi.

Penertiban pengiriman TKI diperlukan untuk menghindari pengiriman TKI ilegal. Pemerintah Indonesia, terutama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan pengiriman TKI ke luar negeri, harus dapat meningkatkan pelayanan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang digunakan oleh TKI dengan waktu yang tidak terlalu dan menghilangkan prosedur yang berbelit-belit. TKI yang dikirim secara legal akan tercatat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sehingga kepentingan dan kedudukannya WNI sebagai tenaga kerja asing dapat dilindungi.

Diplomasi antara Malaysia dan Indonesia dalam pemulangan TKI oleh Malaysia perlu ditingkatkan karena kedua negara sangat membutuhkan. Indonesia membutuhkan lapangan kerja akibat jumlah penduduk yang sangat besar tidak mampu terserap oleh lapangan kerja yang ada. Sementara Malaysia kekurangan tenaga kerja untuk membangun negaranya.

Departemen Luar Negeri, sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Perwakilan Republik Indonesia harus meningkatkan pengawasannya sehingga peranan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemulangan ratusan ribu TKI ilegal dari Malaysia tidak terjadi kembali.